

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amalia, M., Andrias, M. Y., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). Pengantar Ilmu Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amin, F., Susmayanti, R., Faried, F. S., Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Permana, D. Yudanto & Rizaldi, M. (2023). Ilmu Perundang-Undangan. Sada Kurnia Pustaka.
- Ardipandanto, A., & Budiman, A. (2018). *Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bagir Manan, 2004, Teori dan Politik Konstitusi (Cetakan Kedua), Yogyakarta: FH UII Press.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. Scopindo Media Pustaka.
- Grafika, R.S., (2022). Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Kehutanan dan Pertanian. PT Bumi Aksara.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum tata negara Indonesia*. Kencana.
- Kusdarini, E. (2020). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Uny Press.
- MUNAF, Yusri. Hukum administrasi negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.

- Palullungan, L., & SH, M. (2023). *Pembentukan Peraturan Daerah*. Nas Media Pustaka. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,(Jakarta: Kencana Prenada, 2011).
- Populer, B.,I. (2017). Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI : Undang-undang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya. Bhuna Ilmu Populer.
- Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik. (2023). *Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Nuansa Cendekia.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. Nuansa Cendekia.
- Silvia Permata Sari, Gunawan, Indra Permana, Amelia Lulu Rosalin Hutabarat, Dewiarum Sari, Ina Nurtanti, Arif Rahman Azis, Desna Ayu Wijayanti, S. V. (2024).
Pengelolaan limbah peternakan (A. Yanto (ed.); Issue June). Get Press Indonesia.
- Sudrajat, T. (2022). *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika.
- Sugianto, B., Rusmini, R., Rosalinda, R., & Sahara, S. (2024). Pengantar Hukum Pemerintahan Daerah. *Tangguh Denara Jaya Publisher*. Susanti, D. O., Sh, M., Efendi, A. A., & SH, M. (2022). Penelitian Hukum: Legal Research. Sinar Grafika.
- Tutik, T. T. (2017). *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Prenadamedia Group.

Zamroni, M. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Delta Pijar Khatulistiwa.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338).

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 20 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat Di Kotamadya Tingkat II

Surabaya. (Lembaran Daerah Kotaamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1997 Seri B pada tanggal 9 Juni 1997 Nomor 2/B)

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. (Lembaran Daerah Kot amadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1984 Seri C pada tanggal 24 Januari 1984 Nomor 2/C).

JURNAL

Annisa, B., Nazila, F., Fazlim, M. R., Khairi, E. S., & Siregar, F. A. (2025). Kajian Kritis atas Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Keputusan Administratif. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, hlm. 18-24.

Arifin, F. (2025). Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, hlm. 25-37.

Asnawi, E., & Andrizal, A. (2021). Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), hlm. 242-263.

Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. In Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan (Vol. 1). 1-17

Astuti, A. D., & Akbar, M. (2021). Kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Penertiban Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005

- (Studi Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Torue). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(4), hlm. 205-210.
- Bihuku, S. (2018). Urusan Pemerintahan Konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*, 6.
- Bulu, P. M. (2023). Epidemiologi, Penanggulangan Dan Pemberantasan Penyakit Mulut Dan Kuku (Pembelajaran dari Wabah PMK Indonesia 1887-1997). *Partner*. Hal 70.
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, hlm. 699-711.
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, hlm. 99-115.
- Herlina, M. (2021). Sumber Kewenangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara. Universitas Ekasakti Padang, hlm. 5.
- Herman, H., & Noor, H. J. (2017). Doktrin tindakan hukum administrasi negara membuat keputusan (beschikking). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), hlm. 82-95.
- Hutabarat, C. L., & Banjarnahor, D. N. (2025). Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam UUD Sebelum Reformasi Dan UUD Sesudah Reformasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*.
- Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V. (2020). Penegakan supremasi hukum melalui implementasi nilai demokrasi. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 83-93

- Karwur, C. E. T. (2024). Pemenuhan hak memperoleh kesehatan ditinjau dari pasal 28 h ayat 1 undang–undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. *Lex privatum*, 13(2).
- Khoiriyah, N., Anindita, R., Hanani, N., & Muhaimin, A. W. (2018). Permintaan Pangan Hewani Di Pedesaan Jawa Timur, Indonesia. *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 2(2), hlm. 198-207.
- Parawansa, S. A., Fahmal, A. M., & Razak, A. (2022). Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Penertibannya Di Kota Palopo. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(3), hlm. 486-500.
- Rizhan, A. (2021). Konsep Negara Hukum Profetik. *Kodifikasi*, 3(1).
- Rizhan, A., Aprinelita, A., & Shilvirichiyanti, S. (2021, December). Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyusunan (Teknik Legal Drafting) Dan Implementasi Peraturan Desa Koto Benai Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 58-64).
- Rudy, R., Yusnani, H., Roro, R., & Siti, K. (2018). Model Social Justice Assesment Dalam pembentukan Peraturan di Daerah.
- Selly, G. (2023). INTEGRASI SYARIAH DALAM PERATURAN DAERAH INDONESIA: DIALEKTIKA FILSAFAT HUKUM ISLAM PROFETIK DAN PARADIGMA THOMAS KUHN: Sharia Integration in Indonesian Regional Regulations: Dialectics of Prophetic Islamic Law Philosophy and Thomas Kuhn's Paradigm. *Constitution Journal*.

Septiani, M., Sugiharto, I., & Taufik, M. (2024). Urgensi Pemetaan Legal Framework Dalam Pembentukan Perda. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 109-116.

Wicaksono, D. A., & Rahman, F. (2020). Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 11(2), 231-248.

Zaini, A. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan ham. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1), 13-48.

DISERTASI

Fathir, N. (2023). *Rekonstruksi Implementasi Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif dan Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Guntoro, T. (2023). *Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Dalam Perizinan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan/Produk Hewan Dalam Menjamin Kesehatan Hewan* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).

Mandella, C. A. R. (2023). Analisis Pembentukan Kekhususan Ibu Kota Nusantara Dalam Prinsip Pemberian Otonomi Khusus Menurut Perspektif Siyash Syar'iyah (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).

WEBSITE

DKPP Surabaya Respons Cepat Cegah Masuknya Penularan Virus PMK, Pemerintah Kota Surabaya, Selasa, 10 Mei 2022/ 15.10 WIB, diakses 30 September 2025

Kebutuhan Daging Sapi Tahun Ini 700.000 Ton, Produksi Dalam Negri Hanya Separuhnya, eKoran Kontan.co.id., Reporter: Siti Masitoh; Minggu, 20 Juni 2022 / 14:43 WIB, diakses 12 April 2025.

Sejumlah hewan ternak di Lakarsantri dan Sambikerep Surabaya "suspect" PMK, Antara News Jatim, Rabu, 18 Mei 2022 / 16.00, diakses 30 September 2025